

MASYARAKAT INDONESIA DITINJAU DARI PARADIGMA KONFLIK KARL MARX

Agustinus Wisnu Dewantara, S.S.

FKIP – Bimbingan Konseling Universitas Widya Mandala Madiun

ABSTRACT

All men by nature have a desire to build some associations like family, community, or society. In this pattern it is known that social life is the natural association of the human being. This fact encourages some philosophers to study every kind of social lives.

This paper punctuate the conflict theory that having no popularity, because of its risks. This theory influenced by Karl Marx. Social lives, according to Karl Marx, are not perceived as a harmony, but a conflict. Marx promoted some points of social building in which thesis, antithesis, and synthesis become the crucial elements.

Marx's definition is distinct from Auguste Comte's. Comte enthroned the structure, function, equilibrium, and harmony. Comte's argument is the most popular paradigm in the world and of thought and sociology. On the other hand, Marx promoted the minor views that suggested the conflict.

Marx's point of view is not the only one. His paradigm is not also the ultimate, truthful, and final conclusion. So, a research using conflict theory is different from Comte's theory, and this paper will explore Indonesian situations with Marx's point of view. But, again, it is not the only one.

Key words : *conflicts, interest, power, ideology, equilibrium, dialectics, society.*

A. Masyarakat : Suatu Keteraturan Atau Konflik?

1. Pengantar

Masyarakat kerap dipandang sebagai suatu keteraturan. Masyarakat dimengerti sebagai satu sistem sosial yang terdiri atas individu-individu dan kelompok-kelompok yang berinteraksi secara harmonis. Masyarakat yang baik dan ideal adalah masyarakat yang dicirikan oleh keseimbangan (*equilibrium*) dan jauh dari guncangan. Bagaimana dengan masyarakat Indonesia?

Selama beberapa tahun terakhir, segenap rakyat Indonesia dihadapkan

kepada situasi yang kian hari kian memburuk. Krisis moneter yang berkepanjangan membuat sebagian besar rakyat Indonesia menderita. Jumlah penduduk miskin terus bertambah dari hari ke hari, bahkan banyak dari antara mereka tidak lagi bisa mengembangkan kemampuannya secara optimal. Krisis yang sedang menghebat ini semula diharapkan dapat menjadi momentum yang baik untuk menengok kembali sistem hidup bersama yang sudah ada. Oleh karena itu, tekad untuk melakukan reformasi di segala bidang pun mulai digulirkan. Tetapi anehnya, semua ini tidak membawa bangsa Indonesia kepada situasi yang

semakin baik. Sebaliknya, yang terjadi adalah saling tuduh, saling hujat, saling jegal, dan aneka konflik terus saja mengemuka. Beberapa contoh bisa saja dikemukakan di sini, misalnya: kerusuhan antarsuporter sepakbola, aneka demonstrasi, konflik bersenjata di Aceh dan tempat lain, kerusuhan antardesa. Pertanyaan yang kemudian mengusik adalah, "Apa yang sebenarnya terjadi dengan masyarakat Indonesia?"

Kalau masyarakat dimengerti sebagai keteraturan, bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Pertanyaan ini cukup mendasar untuk dikemukakan karena ternyata yang terjadi sekarang adalah aneka ketidakteraturan, konflik, dan pergolakan. Akan tetapi adakah suatu masyarakat yang tanpa konflik? Lalu, masyarakat yang baik adalah yang ditandai konflik atau tanpa konflik?

2. Pengertian

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah sistem sosial yang terbesar dan paling inklusif. Masyarakat disebut sistem sosial karena terdiri atas individu-individu dan kelompok-kelompok yang berinteraksi dengan cara-cara yang kurang lebih tetap dan terpola (Sadbudianto, 2000). Dengan demikian, satu perubahan dari sistem tersebut dapat mempengaruhi bagian-bagian yang lain.

3. Ruang Lingkup

Tulisan ini tidak akan membahas semua pengertian masyarakat yang digagas oleh berbagai filosof. Lalu pemikir mana yang hendak dijadikan sebagai acuan dalam menggarap tema ini? Karl Marx. Mengapa? Karena tokoh ini menawarkan suatu cara pan-

dang lain dalam mengerti dan meng-gagas suatu masyarakat. Pengertian yang diusung oleh Auguste Comte dan Talcot Parsons yang umum diterima (masyarakat dimengerti sebagai keteraturan) tetap akan disajikan sebagai pembanding, akan tetapi fokus yang akan diarah adalah menggali pemikiran alternatif yang dikemukakan oleh Karl Marx. Dari paradigma inilah masyarakat Indonesia kemudian disoroti. Paradigma konflik adalah salah satu cara pandang saja mengenai masyarakat, sehingga jelas tidak dimaksudkan sebagai suatu pemutlakan, apalagi penghakiman dengan benar atau salah.

B. Masyarakat Menurut Karl Marx

1. Siapa Karl Marx?

Karl Marx pernah amat populer baik itu di dunia maupun di Indonesia. Ia dikenal sebagai bapak pencetus Marxisme yang kemudian berkembang menjadi komunisme. Selama abad ke-20, komunisme menjadi salah satu ideologi dan kekuatan politik yang paling dahsyat di dunia. Sepertiga umat manusia pernah hidup di bawah komunisme. Bangsa Indonesia juga pernah mengalami hal yang sama, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) begitu mendominasi kehidupan politik beberapa tahun silam.

Bangsa Indonesia, di bawah pemerintahan Orde Baru, mengharamkan Komunisme-Marxisme-Leninisme untuk masuk dalam segala sendi kehidupan. Paham ini menjadi amat ditakuti, karena barangsiapa bersentuhan dengannya pastilah dituding komunis, dan karenanya harus ditangkap dan dikucilkan, bahkan harus dibuang sampai ke Pulau Buru. Akan tetapi siapa Karl Marx dan

bagaimanakah pemikirannya hingga dunia begitu ketakutan karenanya?

Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Trier, perbatasan barat Jerman. Marx amat meminati filsafat, hingga akhirnya ia belajar filsafat di Berlin. Di sanalah ia berkenalan dengan filsafat Hegel. Baginya filsafat Hegel merupakan senjata intelektual yang ampuh untuk mengkritisi situasi masyarakat waktu itu. Dialektika Hegelian yang ditandai oleh tiga poros penting (tesis, antitesis, dan sintesis) diambilnya sebagai dasar menyusun dalil-dalil pemikirannya. Dialektika roh yang digagas Hegel dibumikan oleh Marx menjadi dialektika materi yang akhirnya begitu mengguncang dunia. Hegel dikritiknya terlalu idealis dan tidak memberi sumbangan apa-apa bagi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Marx mengambil model dialektika Hegel untuk mengkritisi situasi dunia, karena filsafat bagi Marx harus menjadi pendorong perubahan sosial (Magnis Suseno, 2000).

Marx menyebut dirinya sebagai penemu "sosialisme ilmiah," yaitu sosialisme yang tidak berdasarkan harapan belaka, melainkan berdasarkan analisis ilmiah (lewat piranti dialektika tesis, antitesis, dan sintesis) terhadap perkembangan masyarakat. Marx berpendapat bahwa sejarah perkembangan masyarakat adalah sejarah perkembangan materi, sehingga ekonomilah hal yang menjadi dasar (infrastruktur), sedangkan agama/ideologi hanyalah sebagai suprastruktur.

Berbagai tulisan dan pendapatnya memang sangat kontroversial. Marx bahkan harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena pemerintah di tempat ia berada terpaksa mengusirnya. Ia meninggal pada tahun

1883 dengan kondisi yang amat menyedihkan.

2. Karl Marx Memandang Masyarakat

Bagi Karl Marx, masyarakat adalah buatan manusia. Dari sini dapat dimengerti bahwa manusia kemudian mempunyai kuasa untuk membentuk ataupun mengubahnya. Marx bahkan secara tegas bersuara, "Para filosof hanya menginterpretasikan dunia (masyarakat) secara berbeda, yang perlu hanya mengubahnya!" (MEW 3: 535). Dengan demikian masyarakat tidak berevolusi sendiri, karena ada pengaruh manusia di dalamnya.

Pandangan ini jelas berbeda dengan apa yang digagas oleh bapak sosiologi, Auguste Comte. Comte berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu entitas tersendiri. Benar bahwa masyarakat itu terdiri atas individu-individu, tetapi masyarakat tidak bisa diterangkan hanya dari kumpulan individu. Ia adalah entitas sendiri yang tentunya mempunyai hukumnya sendiri pula.

Dalam tulisannya, *German Ideology*, Marx merumuskan suatu premis dasar bahwa bidang ekonomi mienentukan pemikiran manusia. Mengapa ekonomi? Karena Marx hendak konsisten dengan dalilnya mengenai dialektika materi. Baginya materi ini dapat diidentifikasi sebagai ekonomi.

Kondisi ekonomi inilah yang kemudian membentuk kesadaran seseorang. Dengan kata lain, pandangan seseorang mengenai dunia ditentukan oleh posisi ekonominya (Marx: posisi kelasnya). Seseorang yang berada dalam kelas yang terhormat tentu memiliki pandangan dan wawasan yang berbeda dengan orang yang berada di kelas bawah. Perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan

konflik.

Dunia dalam kacamata Marx diwarnai oleh pertentangan antarkelas: kelas bawah (proletar) dan kelas atas (pemilik kapital). Menurut Marx, kaum proletar jelas tidak mempunyai pandangan dan kesadaran yang utuh serta obyektif mengenai dunia. Kesadaran yang dimiliki oleh kaum buruh/miskin/proletar/tertindas adalah kesadaran yang palsu. Mengapa? Karena mereka diasingkan oleh kaum pemilik modal dengan aneka ideologi. Untuk itulah perlu diadakan suatu revolusi. Revolusi yang ditandai dengan bersatunya kaum buruh. Revolusi berarti konflik! Untuk itu, dalam kacamata Marx konflik adalah hal yang tidak dapat dielakkan dan normal.

3. Paradigma (Teori) Konflik Marx

Dalam ilmu-ilmu sosial, ada berbagai paradigma untuk menganalisis suatu masyarakat dan aneka gejala sosial. Sosiologi sendiri paling tidak memiliki empat paradigma besar dalam mengerti masyarakat, yaitu: Paradigma struktural fungsional (Talcott Parsons, Auguste Comte), konflik (Marx, Jessie Bernard, Ralf Dahrendorf, Lewis Coser, dll), interaksi simbolis (John Dewey, George Herbert Mead), dan pertukaran sosial (Blummer).

a. Paradigma

Sebelum membahas apa itu paradigma konflik, terlebih dahulu perlu diketengahkan mengenai apa itu paradigma. Paradigma adalah sudut pandang atau kerangka acuan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988*). Dengan kata lain, paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap dunia, tentu tanpa mengadili salah ataupun benar (Sadbudianto, 2000).

Sebagai suatu cara pandang, suatu paradigma (teori) tentu tidak bernilai mutlak, karena pasti ada cara pandang lain yang memandang suatu hal yang sama dengan cara yang lain pula. Paradigma konflik dengan demikian hanyalah salah satu cara pandang dan tidak mutlak benar.

b. Paradigma Konflik

Lewis A. Coser menjelaskan konflik dalam uraian berikut ini:

"Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka." (*Conflict, Enc of the Soc.Sc.*, 1972)

Dikatakan pula oleh Coser, bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu-individu, kumpulan-kumpulan (*collectivities*), atau antara individu dengan kumpulan.

Teori konflik mengatakan bahwa perselisihan, baik yang bersifat antar-kelompok, antarindividu, ataupun antara keduanya, selalu ada di dalam hidup bersama. Konflik merupakan unsur interaksi yang amat penting. Bahkan menurut teori ini, konflik sama sekali tidak boleh dikatakan sebagai sesuatu yang jelek, merusak, atau memecah belah. Justru konflik dapat menyumbangkan banyak hal kepada kelestarian masyarakat dan mempererat hubungan tiap anggotanya.

Paradigma konflik ini dianut antara lain oleh Coser dan Dahrendorf. Akan tetapi paradigma ini sebenarnya

menemukan asal-muasalnya pada pemikiran Karl Marx.

4. Masyarakat Ditinjau dari Paradigma Konflik

Analisis masyarakat dengan memakai teori konflik ini bertitik tolak dari kenyataan bahwa ada paling tidak dua golongan besar di dalamnya, yaitu golongan berkuasa dan golongan yang dikuasai. Inilah yang kemudian memunculkan konflik. Mengapa? Karena dua golongan besar ini pasti menimbulkan pula kepentingan yang berbeda. Jika kepentingannya berbeda maka lahirlah pula benturan (konflik), karena masing-masing golongan pasti ingin memperjuangkan kepentingannya.

Kepentingan dari pihak yang berkuasa pasti berbeda dengan kepentingan dari pihak yang lemah. Kepentingan yang paling sering muncul dari pihak yang berkuasa menurut Marx adalah bagaimana mereka bisa melanggengkan kekuasaannya. Kepentingan golongan atas dengan demikian adalah bagaimana mereka menggunakan kekuasaan dan mempertahankan kedaulatan ekonominya. Dari sini pihak penguasa lalu memerlukan suatu ideologi, pembenaran, atau apapun namanya untuk meninabobokkan kaum proletar agar tidak memberontak. Dengan kata lain, pihak proletar perlu, bahkan harus diasingkan dari semua hal yang membuat mereka sadar tentang siapa dirinya sendiri. Kalau perlu, kaum proletar harus diasingkan dari dirinya sendiri.

Itulah masyarakat yang hendak dikritik Marx. Masyarakat yang harus segera dirombak dan diganti (pasti melalui konflik) dengan masyarakat baru yang dinamainya dengan masyarakat tanpa kelas. Dalam garis

pemikiran ini, Marx mengambil dialektika Hegel dengan mengatakan bahwa kelas bawah adalah tesis, masyarakat atas adalah antitesis, dan masyarakat baru yang akan terbentuk nanti (masyarakat tanpa kelas) adalah sintesis.

Itulah hukum masyarakat dan dunia : tesis, antitesis, dan sintesis. Selalu saja ada perguliran dialektis (konflik) di dalam masyarakat. Jika tidak, masyarakat tetap tinggal statis dan dikuasai oleh ketidakadilan yang semakin menggurita.

5. Beberapa Hal Penting dalam Teori Konflik

a. Kekuasaan

Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk memenangkan kemauan sendiri, juga kalau kemauan itu bertentangan dengan kemauan orang lain (Veiger, 1990). Tidak dapat dipungkiri bahwa konsep dan terminus kekuasaan selalu muncul dalam suatu relasi. Berikut ini adalah beberapa hal penting mengenai relasi dan kekuasaan :

- 1) Ada dua tipe relasi, yaitu tipe superordinasi : relasi antara atasan dengan bawahan dan tipe subordinasi: relasi bawahan dengan atasan (Veiger, 215).
- 2) Relasi superordinasi dan subordinasi ini ada dalam suatu hubungan di mana pihak atasan mengontrol tingkah laku bawahan melalui larangan dan perintah.

Dengan demikian pihak yang bawah mempunyai kewajiban untuk taat. Pengandaian dari relasi semacam ini adalah adanya kekuasaan. Pihak yang atas mempunyai kekuasaan sehingga ia merasa mempunyai wewenang untuk memerintah dan memaksa pihak yang berada di bawah untuk menaatinya.

b. Kepentingan

Masyarakat terdiri atas kelas-kelas. Kelas yang satu tentu mempunyai perbedaan kepentingan dengan kelas yang lain. Pihak penguasa memiliki kepentingan untuk mempertahankan apa yang dimilikinya, sedang pihak bawah akan cenderung berkepentingan untuk mengadakan suatu perubahan.

Dahrendorf membuat perbedaan yang cukup penting dalam kaitannya dengan hal ini. Menurutnya ada dua macam kelompok kepentingan : kelompok potensial dan aktual.

Kalau sejumlah orang mempunyai kepentingan bersama (entah kepentingan itu disadari ataupun tidak disadari), namun mereka belum berorganisasi dan tidak bersatu, mereka disebut kelompok potensial. Kelompok ini mempunyai potensi untuk mengaktualkan kepentingan itu, akan tetapi untuk sementara hanya berupa potensi atau *recruiting field for groups* (Ginsberg, 1953: 40).

Apabila orang-orang yang satu kepentingan dipertemukan dalam satu kelompok, partai, atau organisasi, dan kepentingan mereka menjelma menjadi suatu program yang konkret, maka mereka dapat disebut sebagai kelompok konflik aktual. Di sinilah mereka mulai mengaktualkan potensi yang telah dimiliki menjadi suatu gerakan bersama yang konkret.

6. Teori Struktural Fungsional sebagai Pemanding Teori Konflik

Untuk memahami bagaimana teori konflik bekerja, perlu ditampilkan pula sedikit panorama mengenai apa dan bagaimana teori struktural fungsional memahami masyarakat. Pandangan struktural fungsional (atau kerap disebut fungsionalisme) dikemukakan oleh

Talcot Parsons, yang sebelumnya terlebih dahulu diawali oleh Auguste Comte, sang bapak sosiologi. Sejak awal permulaan karirnya sebagai sosiolog, Parsons dikesankan oleh keadaan teratur yang disebut sebagai masyarakat. Keteraturan masyarakat disebabkan oleh adanya nilai-nilai budaya yang dibagi bersama. Nilai-nilai inilah yang kemudian dilembagakan menjadi norma-norma sosial dan kemudian dibatinkan oleh masing-masing individu menjadi motivasi-motivasi (Parsons, *The Structure of Social Action*, 1938).

Pendapat ini diadopsi dari tesis Comte yang mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu entitas tersendiri. Oleh karena itu, masyarakat adalah suatu kesatuan organis yang tidak menoleransi adanya konflik dan perbedaan antarkelas ataupun antarindividu. Masing-masing bagian yang ada dalam masyarakat justru berfungsi untuk mendukung kinerja keseluruhan dan mengabdikan kepada keseluruhan dengan sukarela. Dengan demikian jelas tidak ada tempat bagi perbedaan kepentingan dan perebutan kekuasaan.

Dalam paradigma struktural fungsional, masyarakat dimengerti sebagai kesatuan yang organis yang dibentuk melalui konsensus. Masyarakat yang demikian tentu memiliki tujuan bersama yang dikejar. Untuk mencapainya perlu ada kerjasama, saling bantu, dan bahu-membahu. Tidak ada konflik kepentingan, karena ideologi adalah norma-norma yang bertujuan untuk pencapaian kebaikan bersama.

Masyarakat yang dicita-citakan oleh para fungsionalis dengan demikian adalah masyarakat yang diwarnai oleh keharmonisan dan keseimbangan. Dalam alur pikir ini *equilibrium* adalah hal yang normal dan konflik adalah ketidaknormalan.

Pandangan harmonis yang digagas oleh teori struktural fungsional tentu amat berbeda dengan cara pandang

Karl Marx. Tabel berikut memaparkan beberapa perbedaan penting antara fungsionalisme dan teori konflik :

Perbedaan Fungsionalisme dan Teori Konflik

| Paradigma Struktural Fungsional | Paradigma Konflik |
|--|--|
| 1. Masyarakat dilihat sebagai kesatuan yang organis (keseluruhan). | 1. Masyarakat dilihat sebagai kelas-kelas yang saling berbeda (bagian-bagian). |
| 2. Adanya konsensus atau kesadaran bersama (<i>common conscience</i>) dalam masyarakat. Hal ini ada karena masyarakat itu mengejar tujuan bersama. | 2. Masyarakat diwarnai oleh kepentingan (<i>self interest</i>). Kepentingan ini muncul karena adanya perbedaan posisi kelas. |
| 3. Masyarakat yang seperti ini diwarnai dengan kerjasama. | 3. Perbedaan <i>self interest</i> menimbulkan konflik. |
| 4. Ideologi yang diciptakan adalah norma-norma untuk mencapai tujuan bersama. | 4. Ideologi yang berlaku adalah ideologi buatan kelas atas, yaitu: kekuasaan (<i>power</i>). <i>Power</i> ini bisa menjelma menjadi kekuatan politik, budaya, ekonomi, dan sosial. |
| 5. <i>Equilibrium</i> (keseimbangan) adalah hal yang normal. | 5. Konflik adalah hal yang wajar, justru harus dicurigai jika tidak ada konflik yang terjadi dalam masyarakat itu. |

C. Relevansi Teori Konflik bagi Masyarakat Indonesia

Pandangan Karl Marx tentang masyarakat ternyata amat berbeda dengan pola pemikiran para penganut fungsionalisme. Cara berpikir fungsionalisme memang umum digunakan, akan tetapi ada baiknya jika masyarakat disoroti secara lain, sehingga dari sini diharapkan muncul beberapa sumbangan pemikiran yang konstruktif.

Masyarakat Indonesia ternyata amat akrab dengan ideologi dan Marx justru kerap mencurigai hal ini karena

pihak yang berkuasa kerap mengideologikan kepentingannya menjadi nilai-nilai dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai sesuatu yang sakti. Dengan berbuat demikian, mereka berharap agar kedudukan dan kekuasaan mereka makin kokoh. Dalam situasi yang seperti ini, oposisi jelas dianggap sebagai lawan. Segala sesuatu yang bertentangan langsung dicurigai sebagai oposisi dan kepadanya akan diberikan label "subversif!" Tak terbilang jumlah orang yang akan dihukum mati atau disingkirkan dari

hidup bersama karena label subversif ini. Hal inilah yang harus secara jujur diakui ada dan terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Pihak yang berkuasa hampir selalu merangkul pihak-pihak yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat. Pihak yang berpengaruh ini bisa berupa lembaga keagamaan, adat, budaya, politik, dan lain sebagainya. Mereka perlu dirangkul supaya kepentingan penguasa mempunyai pembenaran, baik itu pembenaran dari sudut ideologis, adat, teologis, politis, dan seterusnya. Tidak heran jika kemudian agama kerap menjadi rebutan. Hal ini pernah dan berulang kali terjadi. Karl Marx adalah orang yang mengalami zaman seperti ini, di mana agama kerap digunakan sebagai pembenaran teologis dan ideologis bagi kepentingan kaum berduit dan berpunya.

Pada zaman Marx, ayat-ayat dari Kitab Suci pun kerap dikutip untuk meninabobokkan kaum lemah, misalnya: "Panggullah salibmu....." untuk mengatakan bahwa kaum buruh harus menerima nasib mereka setiap hari sebagai suatu salib yang harus dipikul agar Kerajaan Surga dapat mereka peroleh, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah empunya Kerajaan Surga...." untuk mengatakan bahwa kaum miskin harus menerima takdir mereka dan tidak memberontak, serta aneka pembenaran agamis lainnya.

Dari kaca mata ini tidak heran jika Marx mengkritik agama sebagai candu bagi masyarakat. Agama bukan lagi menjadi piranti untuk memerdekakan seseorang, tetapi alat untuk membuat mereka melayang-layang dan terlena dalam keadaan hidup yang menyedihkan.

D. Simpulan : Masyarakat Indonesia itu Dialektis

Marx sebenarnya menyumbang suatu pisau analisis yang amat tajam dalam mengkritisi situasi masyarakat. Sebagai suatu pisau, paham yang digagas oleh Marx sungguh kritis dan sekaligus terkesan kasar. Mengapa? Karena masyarakat seakan-akan disoroti secara negatif, meski sebenarnya ada beberapa kebenaran yang terkandung di dalamnya yang tidak dilihat oleh para pemikir yang lain. Inilah yang sebaiknya diambil untuk mengkritisi masyarakat Indonesia yang jamak dan yang akhir-akhir ini akrab dengan konflik.

Beberapa kesimpulan kecil yang dapat diambil dalam paparan ini antara lain adalah: pertama, masyarakat Indonesia yang "Bhinneka Tunggal Ika" kerap dilihat sebagai suatu fungsionalisme belaka. Ruang untuk mengelaborasi bagian-bagian sebagai keindahan kurang diberi tempat. Sentralisme gaya Orde Baru memhatikan keindahan tiap bagian yang amat berbhinneka ini.

Kedua, perlu digali pula apakah slogan "Bhinneka Tunggal Ika" ini telah diselewengkan oleh kaum-kaum tertentu (yang mempunyai kepentingan) untuk melanggengkan kepentingannya?

Ketiga, penggalian kepentingan tersebut menjadi penting agar menjadi nyata apa "self interest" yang sedang diusung dibalik semua kebijakan yang sedang digulirkan.

Keempat, "power" macam apakah yang sekarang ini sedang digunakan? Apakah agama dan para pemukanya sedang diperalat demi kepentingan tertentu? Jika ini yang terjadi, agama tentu kehilangan fungsinya sebagai penjawab kerinduan manusia akan

kebebasan yang sejati. Agama yang seharusnya menjadi tempat untuk mengillahkan hidup manusia justru akan menjadi ma-nusiawi semata (lengkap dengan segala kekotorannya, hasut-menghasut, main uang, gila kuasa, dll), karena ia hanya menjadi alat pelanggeng ketidakadilan. Harus terus secara jujur dipertanyakan apakah agama sudah dijadikan kendaraan politik tertentu ataukah tidak.

Kelima, jika sebenarnya yang terjadi adalah ketidakadilan, siapkah manusia Indonesia untuk menerima konflik. Lagi-lagi harus dikatakan bahwa konflik tidak identik dengan kerusuhan, tawuran, perang, dan lain sebagainya. Konflik di sini lebih merupakan suatu dialektika, yaitu suatu pergumulan tesis, antitesis, dan

nantinya akan menghasilkan sintesis yang lebih baik. Ada banyak macam dialektika, misalnya: pergumulan pemikiran, perbedaan pendapat, unjuk rasa (dalam arti positif, yaitu penghunjakkan rasa atau pendapat tertentu agar masyarakat mengetahui aspirasi mereka), dan lain-lain. Konflik semacam inilah yang harus diapresiasi sebagai sesuatu yang membangun. Masyarakat Indonesia (bisa dalam lingkup besar sebagai negara, maupun dalam lingkup kecil: RT, RW, lingkungan, desa, dst) lalu harus lebih dilihat sebagai masyarakat yang dialektis demi menuju sesuatu yang lebih baik. Dengan demikian perbedaan pendapat tidak harus mutlak dikatakan sebagai subversif sehingga harus dibunuh atau diberi racun arsenik.

Daftar Pustaka

- Boschenski, J.M. 1974. *Marxismus-Leninismus: Wissenschaft Oder Glaube*. Munchen : Olzog.
- Comte, August. 1877. *Cours de Philosophie Positive (translated: System of Positive Philosophy)*, London: Longmans.
- Coser, Lewis. A. 1964. *The Function of Social Conflict, Free Press Paperback*.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society, Stanford: University Press*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marx, Karl. 1842. *Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie Einleitung (Critique of Hegels Philosophy of Right)*, MEW 1.
- _____. 1845. *Die Deutsche Ideologie (The German Ideology)*. MEW 3.
- _____. 1948. *Manifest der Kommunistischen Partei (Manifesto of the Communist Party)*. MEW 4.

Parsons, Talcott. 1964. *The Social System*. Collier Macmillan Canada Ltd.

Riyanto, Armada, CM. 2000. *Etika*. Malang : STFT Widya Sasana.

_____, 2000. *Filsafat Politik / Kenegaraan (Filsafat Pancasila)*. Malang : STFT Widya Sasana.

Suseno, Franz Magnis. 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta.: Gramedia.

_____. 1997. *Tiga Belas Model Pendekatan Etika*. Yogyakarta.: Kanisius.

_____. 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta : Kanisius.

Veeger, K.J. 1990. *Realitas Sosial: Refleksi Flisafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta : Gramedia.